



Oleh: KHOSYI ALFIN MAULANA²
Email: maulana.khosyi@gmail.com

Saling Silang Pustakawan: Sebuah usulan program¹

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari daratan dan lautan yang begitu luas, memiliki 41 kabupaten/kota yang berada di daerah terluar atau berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satu poin dalam nawacita Presiden Jokowi adalah membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah terluar dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pustakawan khususnya Pejabat Fungsional Pustakawan harus melihat ini sebagai tantangan untuk dapat berperan dalam mensukseskan poin tersebut. Di sisi lain, hanya ada 2 (dua) orang pustakawan yang berada pada salah satu dari 41 kabupaten/kota tersebut. Persebaran pustakawan yang tidak merata sedikit banyak mempengaruhi pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Salah satu kelemahan ini perlu dijawab dan diatasi dalam bentuk sebuah program atau kebijakan.

Kata kunci: *Pustakawan, Manajemen pustakawan dan Program kepustakawanan*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan 1.904.569 km² dan luas lautan 7.900.000 km² (http://indonesia.go.id/?page_id=479&lang=id). Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan lebih dari 90 titik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Melihat hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan pembangunan daerah terluar yang tertuang dalam salah 1 dari 9 cita-cita yang dikenal dengan nawacita pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019 yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat daerah-daerah terluar berarti harus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, melakukan revolusi karakter bangsa terutama nilai-nilai cinta tanah air dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Setiap profesi dan institusi di Indonesia, termasuk pustakawan harus melihat hal ini sebagai tantangan untuk turut berperan dalam

mewujudkan hal tersebut.

Dari halaman resmi BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) (<http://BNPP.go.id>) dapat diketahui sebanyak 13 provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain dan kurang lebih 41 kabupaten/kota dengan 187 kecamatan yang berbatasan langsung. Pada Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara (Bappenas, 2016) dapat terlihat bahwa dari 41 kabupaten/kota terluar, 16 Kabupaten membutuhkan pembangunan perpustakaan. Pembangunan perpustakaan yang baik tidak saja membangun fisik namun juga fungsinya. Orang yang paling tepat dalam membangun dan mengembangkan fungsi perpustakaan adalah pustakawan. Namun demikian, seperti yang tertera pada tabel.1 saat ini pustakawan di wilayah perbatasan hanya ada di Kota Batam.

¹ Juara Ketiga Lomba Pemaknaan dan Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

² Pustakawan Ahli Pertama Perpustakaan Nasional

Tabel. 1 Pustakawan di Kabupaten/Kotamadya terluar

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah Pustakawan
1	Kepulauan Meranti	Riau	0
2	Natuna	Kepulauan Riau	0
3	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	0
4	Karimun	Kepulauan Riau	0
5	Bengkayang	Kalimantan Barat	0
6	Sanggau	Kalimantan Barat	0
7	Sintang	Kalimantan Barat	0
8	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	0
9	Mahakam Hulu	Kalimantan Barat	0
10	Malinau	Kalimantan Utara	0
11	Nunukan	Kalimantan Utara	0
12	Kupang	Nusa Tenggara Timur	0
13	Belu	Nusa Tenggara Timur	0
14	Alor	Nusa Tenggara Timur	0
15	Malaka	Nusa Tenggara Timur	0
16	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	0
17	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	0
18	Talaud	Sulawesi Utara	0
19	Kepulauan Sangihe	Sulawesi utara	0
20	Maluku Tenggara Barat	Maluku	0
21	Maluku Barat Daya	Maluku	0
22	Kepulauan Morotai	Maluku Utara	0
23	Merauke	Papua	0
24	Jayapura	Papua	0
25	Keerom	Papua	0
26	Bovem Digoel	Papua	0
27	Raja Ampat	Papua Barat	0
28	Batam	Kepulauan Riau	0
29	Bengkalis	Riau	0
30	Supiori	Papua	0
31	Kota Sabang	Aceh	0
32	Serdang Begadai	Sulawesi Utara	0
33	Rokan Hilir	Riau	0
34	Indragiri Hilir	Riau	0
35	Pelalawan	Riau	0
36	Kota Dumai	Riau	0
37	Bintan	Riau	0
38	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	0
39	Kepulauan Aru	Maluku	0
40	Peg. Bintang	Papua	0
41	Batam	Kepulauan Riau	2

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pusat Pengembangan Pustakawan (2017)

Tabel 2. Persebaran Pustakawan Indonesia

Provinsi	Jenis Perpustakaan						Jumlah
	Umum Provinsi	Umum Kabupaten	Perguruan Tinggi	Sekolah	Khusus	Nasional	
Aceh	23	4	51	0	2	-	80
Sumatera Utara	45	3	45	2	4	-	99
Sumatera Barat	12	1	88	4	3		108
Riau	39	0	27	7	3	0	76
Kepulauan Riau	0	3	0	0	0	0	3
Bangka Belitung	14	0	0	0	0	0	14
Jambi	30	0	18	5	7	0	60
Bengkulu	11	1	26	0	1	0	39
Sumatera Selatan	34	0	20	11	7	0	72
Lampung	12	0	24	33	1	0	70
Banten	6	2	36	2	9	0	55
DKI Jakarta	19	2	94	0	200	260	575
Jawa Barat	32	16	93	3	83	0	227
Jawa Tengah	25	59	169	19	11	0	283
Jawa Timur	37	28	157	2	9	0	233
DIY	17	27	133	3	12	0	192
Kalimantan Barat	8	0	20	1	2	0	31
Kalimantan Selatan	25	1	30	2	26	0	84
Kalimantan Tengah	24	2	12	0	0	0	38
Kalimantan Timur	17	0	24	0	0	0	41
Kalimantan Utara	-	-	-	-	0	0	0
Bali	28	8	66	13	19	0	134
Nusa Tenggara Barat	28	2	40	4	10	0	84
Nusa Tenggara Timur	9	5	17	0	5	0	36
Gorontalo	0	0	11	0	1	0	12
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	68	12	99	16	26	0	221
Sulawesi Tengah	24	0	34	0	1	0	59
Sulawesi Tenggara	17	2	24	0	1	0	44
Sulawesi Utara	25	0	63	0	0	0	88
Maluku	13	0	10	0	0	0	23
Maluku Utara	0	0	2	0	0	0	2
Papua	17	0	11	0	1	0	29
Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	659	178	1444	127	444	260	3112

Sumber: Pusat Pengembangan Pustakawan (2016)

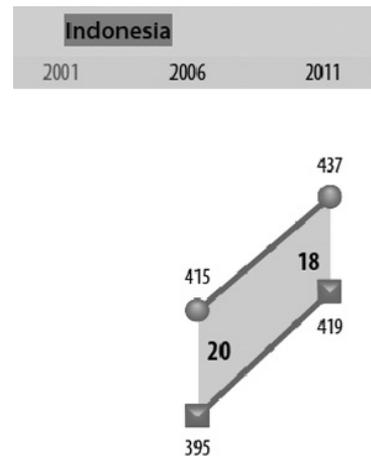
Pustakawan di Indonesia cenderung tidak tersebar secara merata, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Ditinjau dari sisi geografis, Pustakawan Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, hampir 50% berada di Pulau Jawa dan berada di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Padahal

pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Hal tersebut sulit diwujudkan apabila

tidak terdapat perpustakaan dan pustakawan di wilayah tersebut. Kondisi seperti ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan pustakawan dari segi kuantitas maupun kualitas, namun untuk mengisi kekosongan pustakawan di daerah terluar dari sisi kuantitas, diperlukan sebuah kebijakan dan program yang dapat dijalankan agar perpustakaan yang sudah ada dan dibangun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan akan berdampak pada tingkat literasi dan budaya baca masyarakatnya.

International Association for The Evaluation of Educational Achievement (IEA) pada periode 2001-2011 melakukan sebuah penelitian terkait literasi yaitu, Progress in International Reading Literacy Study (PIRS). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur “pengalaman membaca untuk menulis” dan membaca untuk mendapatkan informasi serta menggunakannya. Salah satu indikator dalam mencapai tujuan tersebut adalah “*Students Like to Reading*” indikator ini menyatakan budaya baca, tidak hanya minat baca. Hasilnya adalah 32% Anak Indonesia memiliki budaya baca yang baik di luar tugas sekolahnya, 66% hanya membaca untuk mengerjakan tugas, sedangkan 2% tidak suka membaca. Pada tahun 2006 hasil penelitian UNESCO menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rasio budaya membaca masyarakat Indonesia 0,001 atau 1 : 1000 orang yang memiliki budaya membaca, namun di tahun 2011 pada penelitian ini khususnya untuk siswa di sekolah, rasionya berada di angka 0,05 atau sekitar 1 : 20 siswa. Bila kita melihat pada peringkat, memang pada hasil penelitian tersebut posisi Indonesia berada di urutan 42 dari 45 negara namun setidaknya dari hasil penelitian di tahun 2006 Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup baik, seperti pada gambar 1.

Peningkatan tersebut, sedikit banyak memperlihatkan bahwa terdapat peran perpustakaan dan pustakawan di dalamnya. Beberapa pihak menyatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu tinggi namun kuantitas bahan bacaan yang tersedia tidak mencukupi. Bazar buku di Indonesia biasanya ramai pengunjung dan pembeli, sebagai contoh, Big Bad Wolf diramaikan oleh pengunjung dan pembeli namun apakah semua yang dibeli telah terbaca? Secara harafiah, minat berarti *kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan* sedangkan budaya berarti *sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah* (Kamus Besar Bahasa



Gambar 1. Tren Membaca berdasarkan gender

Indonesia, 2017) secara kata kita dapat memahami bahwa masyarakat Indonesia benar memiliki minat baca yang tinggi namun belum memiliki budaya baca yang baik.

Kondisi yang dijelaskan pada paragraf di atas, menunjukkan bahwa sedikit banyak terdapat andil Perpustakaan Nasional khususnya Deputy Bidang Sumber Daya Perpustakaan yang terdiri dari Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Pusat Pengembangan Pustakawan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pada Laporan Kinerja dan Akuntabilitas (2016) masing-masing pusat, kebutuhan akan sinergi dengan unit kerja terkait menjadi kesamaan langkah perbaikan dalam memaksimalkan capaian kinerja. Kebutuhan sinergitas ini dapat diwujudkan melalui sebuah program terpadu yang dapat melibatkan tiga pusat tersebut serta instansi lain yang berkepentingan. Sinergitas ini harus mampu menjawab permasalahan terkait persebaran pustakawan profesional yang tidak merata dan belum berkembangnya budaya membaca.

Pustakawan

Pustakawan merupakan *key player* berfungsinya organisasi perpustakaan. Pustakawan merupakan sebuah profesi, benarkah?. Istilah *profesi* berasal dari kata *profess* yang berarti ‘pengakuan’, kata *profess* atau *profesi* awalnya digunakan pada abad pertengahan, yaitu di Eropa Barat, di Jerman, dan di berbagai negara Skandinavia dengan istilah Gilda, yakni perkumpulan orang yang memiliki keterampilan khusus, seperti tukang sepatu, tukang kayu, dan tukang pandai besi. Keterampilan khusus ini berkembang menjadi spesialisasi, yaitu orang yang

mengkhususkan diri dalam sebuah pekerjaan khusus (Sulistyo Basuki, 1991). Di sisi lain, Bertens (2004) menyatakan bahwa profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Masyarakat moral yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Jadi, dalam pemahaman penulis, profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pendidikan khusus serta berorientasi pada jasa atau masyarakat dan memiliki nilai-nilai bersama yang diperjuangkan.

Pustakawan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pustakawan merupakan sebuah profesi, karena memiliki keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan/pelatihan, orientasi pada masyarakat dan terdapat nilai-nilai bersama yang diperjuangkan. Apakah nilai-nilai yang dipegang bersama oleh pustakawan Indonesia? yaitu Kode Etik Pustakawan. Pada kode etik pustakawan dijelaskan tanggungjawab pustakawan kepada masyarakat yaitu:

a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai

dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.

- b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.
- c. **Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.**
- d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

Dalam konteks tulisan ini, nilai-nilai yang dihitamkan merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dan diperjuangkan oleh pustakawan, khususnya di wilayah-wilayah terluar Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, persebaran Pustakawan di Indonesia cenderung tidak merata, baik berdasarkan geografis maupun jenis perpustakaan. Pada program yang tertuang dalam tulisan ini, penulis mengajukan program yang melibatkan Pustakawan Perpustakaan Nasional, Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Umum tingkat Kabupaten. Dari hasil pengamatan di acara Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional sejak tahun 2014-2017, penulis telah memetakan kelebihan dan kekurangan pustakawan (pada umumnya) di Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, seperti pada tabel. 3.

Tabel 3. Perbandingan Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Umum

No.	Pustakawan Perpustakaan PT		Pustakawan Perpustakaan Umum	
	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan
1	Kuat secara akademik, meliputi kemampuan menulis, pemahaman teori-teori ilmu perpustakaan dan yang berhubungan.	Pengabdian terhadap masyarakat cenderung kurang (pemanfaatan perpustakaan untuk masyarakat umum)	Berpengalaman dalam melayani berbagai lapisan masyarakat. (pengabdian masyarakat)	Kurang inovasi teknis karena kekurangan pengetahuan terkait keilmuan.
2	Memiliki komunikasi ilmiah yang baik	Sulit dipahami oleh masyarakat secara umum (di luar perguruan tinggi)	Mampu berkomunikasi dengan masyarakat khususnya level pendidikan tidak terlalu tinggi	Kurang meyakinkan bagi masyarakat berpendidikan tinggi.
3	Ahli dalam menggunakan teknologi			Gagap dalam menggunakan teknologi
4	Memahami generasi saat ini			

Dari pengamatan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa salah satu aspek terpenting dalam pengembangan kompetensi pustakawan perguruan tinggi adalah adanya “laboratorium” yang lebih luas untuk menerapkan dan menguji teori-teori yang dimiliki ke dalam masyarakat umum. Sedangkan untuk pustakawan Perpustakaan Umum perlu pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan aspek teori-teori (pengetahuan) kepustakawanan dan teknologi informasi. Pada konteks tulisan ini pustakawan yang terlibat dalam program ini adalah Pejabat Fungsional Pustakawan.

Analisis SWOT Pembudayaan Gemar Membaca dan Pengembangan Pustakawan

Analisis SWOT atau metode analisis SWOT adalah salah satu cara merumuskan strategi penyelesaian masalah dengan mengidentifikasi Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*). Analisis ini menekankan pada prinsip mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta

meminimalisir kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2006), seperti pada tabel 4.

Setelah melakukan identifikasi, menurut Rangkuti (2006) terdapat 4 (empat) kemungkinan strategi dalam menentukan program yang akan dipilih, yaitu

- a. Strategi SO: strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya
- b. Strategi ST: strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO: strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
- d. Strategi WT: Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

Tabel 4. Identifikasi SWOT Pengembangan Pustakawan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Sumber pendanaan jelas	Persebaran pustakawan tidak merata	Pengangkatan PNS ke dalam JFP melalui <i>Inpassing</i>	Perubahan Anggaran (APBNP)
Peraturan terkait sudah ada	Belum adanya program pengembangan yang berkelanjutan	Pada 16 kabupaten/kota terluar pembangunan perpustakaan merupakan sebuah kebutuhan	Birokrasi
Dukungan dari Pemegang Kebijakan	Data pustakawan belum cukup lengkap	Kebutuhan akan kerjasama dari berbagai unit kerja dan pemangku kepentingan	Ketersediaan infrastruktur pendukung
Memiliki jejaring dengan organisasi kepustakawanan	Ketimpangan antara kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan di kota besar dengan daerah terluar	Maraknya gerakan pembudayaan gemar membaca dan gerakan literasi di daerah-daerah	Pemahaman tenaga perpustakaan/(calon) pustakawan terhadap peraturan-peraturan terkait

Bila mengacu pada strategi-strategi tersebut maka kebijakan atau program yang dapat atau telah dilaksanakan adalah:

No.	Strategi	Penjelasan	Program
1	<i>Strength-Threat</i>	Sesuai dengan identifikasi pada tabel 5 maka program dengan pendekatan ini pasti menggunakan Sumber pendanaan yang jelas yang cepat dicairkan dan masif sebelum terdapat perubahan. Selain itu juga menggunakan peraturan dan jaringan yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan buku siap pakai - Sosialisasi peraturan - Pertemuan forum-forum - Pembangunan perpustakaan
2	<i>Weakness-Opportunity</i>	Sesuai dengan identifikasi pada tabel 5 maka program dengan pendekatan ini akan memaksimalkan peluang seperti <i>inpassing</i> , kebutuhan pembangunan perpustakaan dan gerakan pembudayaan gemar membaca. tidak adanya program berkelanjutan yang menjadi kelemahan akan ditutupi dengan kegiatan rutin tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Safari gemar membaca - Sosialisasi - Pendataan pustakawan - Pengangkatan Pustakawan melalui <i>inpassing</i>

3	<i>Weakness-Threat</i>	Sesuai dengan identifikasi pada tabel 5 maka program dengan pendekatan ini akan meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman.	- Tidak ada
4	<i>Strength-Opportunity</i>	Sesuai dengan identifikasi pada tabel 5 maka program dengan pendekatan ini akan mengoptimalkan kekuatan dengan memaksimalkan peluang yang ada.	- Replikasi Perpus Seru - Saling Silang Pustakawan

Program Saling Silang Pustakawan

Deskripsi

Program ini dicetuskan dengan mengacu pada analisis SWOT dengan Strategi SO yaitu mengoptimalkan kekuatan dan memaksimalkan peluang yang ada. Program saling silang pustakawan adalah program pertukaran antar pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten terluar dan/atau Provinsi tempat kabupaten/kota terluar dengan pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi serta pustakawan Perpustakaan Nasional. Program ini mengirim pustakawan yang memiliki kompetensi profesional (*mumpuni*) ke daerah-daerah terluar Indonesia untuk mengembangkan perpustakaan dan budaya baca serta berbagi pengetahuan dengan pustakawan atau tenaga perpustakaan di wilayah tersebut dan mengirim pustakawan (calon pustakawan) di wilayah Perpustakaan Umum Kabupaten terluar ke Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Nasional untuk magang dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif.

Program ini dapat menjadi program *breakthrough* untuk memecahkan permasalahan persebaran pustakawan profesional yang tidak merata dan pengembangan budaya baca yang belum berkelanjutan. Program ini sedikitnya akan melibatkan beberapa Pusat di Perpustakaan Nasional seperti: Pusat Pengembangan Pustakawan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, serta Pemerintah Kabupaten/Kota (Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota), Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Desa. Pembagian wewenang antara urusan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian, mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka masing-masing pihak memiliki peran dalam program tersebut.

Peran masing-masing pihak

Peran Perpustakaan Nasional

1. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

- a. Menyusun dan mengusulkan untuk ditetapkan rancang bangun pengembangan perpustakaan di daerah terluar.
- b. Menyusun dan mengusulkan untuk ditetapkan *grand design* pengembangan budaya baca.

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

- a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada (calon) pustakawan dari wilayah terluar sesuai kebutuhan, tantangan dan *grand design* pengembangan pustakawan.
- b. Menjamin akomodasi (calon) pustakawan dari wilayah terluar selama mengikuti pendidikan dan pelatihan serta magang.
- c. Mengukur *impact* dari pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan.

3. Pusat Pengembangan Pustakawan

- a. Membuat kriteria pustakawan yang dapat mengikuti program ini.
- b. Memetakan kebutuhan tenaga di tiap daerah terluar.

Selain peran yang disebutkan dan diwakili oleh ketiga pusat tersebut, Perpustakaan Nasional juga berperan dalam membuat draft kerjasama antara Perpustakaan Nasional, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah dalam program **saling silang pustakawan**.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan Umum)

- a. Menyediakan akomodasi bagi pustakawan yang mengikuti pertukaran
- b. Menyediakan kebutuhan bagi pustakawan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Membuka dan menginisiasi kerjasama dengan instansi terkait seperti sekolah, Badan Koordinasi Keluarga Berencana tingkat daerah, Ibu-Ibu PKK terkait pembudayaan gemar membaca

Peran Pustakawan Perpustakaan Nasional

Pustakawan Perpustakaan Nasional berperan dalam:

- a. Membuat garis besar pengembangan perpustakaan daerah terluar (Pustakawan Ahli Utama)
- b. Membuat garis besar program pengembangan budaya baca (Pustakawan Ahli Utama)
- c. Mengidentifikasi potensi wilayah (Pustakawan Ahli Madya)
- d. Membuat pedoman teknis pengelolaan perpustakaan daerah terluar (Pustakawan Ahli Muda dan Ahli Pertama)
- e. Membuat pedoman teknis pembudayaan minat baca (Pustakawan Ahli Muda dan Pertama)
- f. Ikut dalam pertukaran (Pustakawan Ahli Muda dan Pertama)
- g. Membuat perangkat penilaian keberhasilan program (Pustakawan Madya-Utama)
- h. Memonitoring Pelaksanaan (Pustakawan Ahli Muda)
- i. Mengevaluasi Pelaksanaan (Pustakawan Ahli Madya)

Peran Pustakawan Perguruan Tinggi

- a. Ikut dalam pertukaran
- b. Merancang pengembangan perpustakaan dan budaya baca di daerah yang dituju

- c. Mendidik dan berbagi pengetahuan dengan pustakawan atau tenaga perpustakaan di daerah terluar.

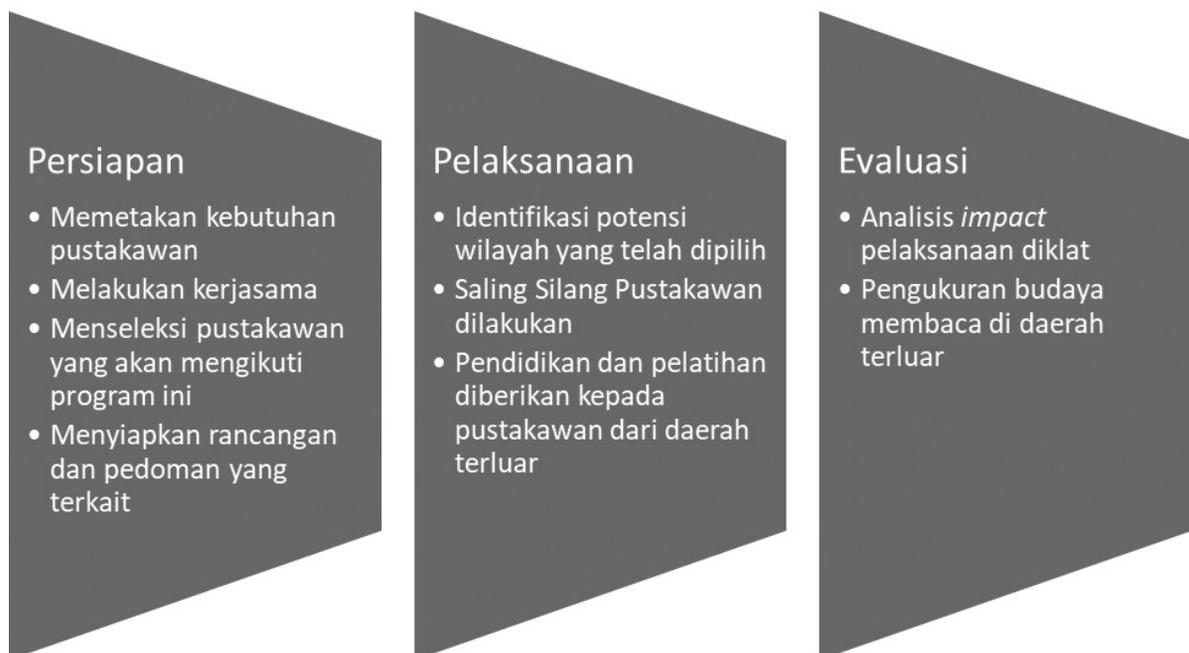
Peran (calon) Pustakawan Perpustakaan Umum Kabupaten/kota terluar

- a. Ikut dalam pertukaran (mengikuti pendidikan dan pelatihan)
- b. Membuat gambaran umum daerahnya
- c. Menginventarisir pustakawan dan tenaga perpustakaan di wilayahnya

Alur Pelaksanaan

Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap yang krusial dalam program ini. Tahap ini diawali dengan pemetaan kebutuhan pustakawan, pada tahap ini akan terdapat analisis yang menyatakan jumlah, kriteria pustakawan yang diharapkan untuk mengikuti program ini dan wilayah yang menjadi prioritas pertukaran. Selanjutnya adalah melakukan proses kerjasama dengan *stake holder* terkait, pada proses ini harus disepakati beberapa hal, seperti aspek kepegawaian, skema pembiayaan, hak dan kewajiban, dan kriteria pustakawan atau calon pustakawan yang dapat diikutkan. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah menseleksi pustakawan yang akan mengikuti program



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan

ini, pada tahap ini, tidak hanya dilakukan seleksi sesuai kriteria yang disepakati namun juga para calon peserta diberi pembekalan pengetahuan dan keterampilan untuk kesuksesan program ini, khususnya yang akan dikirim ke daerah terluar. Menyiapkan rancangan pedoman dan peraturan terkait dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan dengan tahap-tahap pada tahap persiapan. Rancangan pedoman dan peraturan terkait disusun oleh Perpustakaan Nasional, melalui Pustakawan-Pustakawan dan Pusat-Pusat yang terkait dalam program ini.

Pelaksanaan

Identifikasi potensi wilayah dalam tahap pelaksanaan adalah proses menggambarkan keadaan suatu wilayah dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan aspek kepustakawanan seperti indeks minat baca, koleksi lokal dan lain-lain. Pada pelaksanaan saling silang pustakawan, pustakawan yang dikirimkan ke daerah terluar wajib dibantu oleh Perpustakaan Daerah (kabupaten/provinsi) dalam proses penyesuaian dengan daerah tersebut. Pustakawan tersebut selain mengelola perpustakaan secara profesional diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan komponen-komponen masyarakat seperti PKK, masyarakat adat, guru dan sekolah dalam pembudayaan gemar membaca. Sementara itu, pustakawan/calon pustakawan yang dikirimkan ke Pusdiklat Perpustakaan Nasional, mengikuti diklat-diklat yang telah disiapkan oleh Pusdiklat Perpustakaan Nasional, diklat yang diikuti harus berkesinambungan selama kurang lebih 6-9 bulan dan dikirimkan ke perpustakaan-perpustakaan di wilayah Jabodetabek untuk magang.

Evaluasi

Tahap evaluasi dapat menggambarkan keberhasilan program, pada tahap ini dilakukan pengukuran terhadap dua hal, (1) *learning impact* dan (2) indeks minat baca. *Learning impact* akan menggambarkan sejauh mana diklat berdampak terhadap kompetensi seseorang, aspek yang dianalisis tidak hanya kognitif (pengetahuan) namun juga kemampuan (*skill*) dan sikap kerja. Indeks minat baca akan menggambarkan kondisi minat baca di daerah tersebut. Dalam melaksanakan tahap ini, diharuskan membuat dan menentukan instrument-instrumen serta indikator-indikator sebelum pelaksanaan dan pengambilan data setelah pelaksanaan .

Penutup

Indonesia memiliki luas darat dan laut yang tidak bisa

dibidang kecil, bila kita tarik garis dari Sabang sampai Merauka pada Peta, lalu kita pindahkan garis tersebut ke Eropa, garis tersebut akan terbentang dari Inggris Raya sampai Turki. Negeri yang luas ini memiliki setidaknya 41 kabupaten/kota yang berbatasan dengan Negara lain. Di sisi lain dari 41 kabupaten/kota terluar ini, sebagian belum memiliki perpustakaan dan hanya satu kota yang memiliki pustakawan. Hal tersebut menandakan ketidakmerataannya persebaran pustakawan di Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada pembudayaan gemar membaca dan tingkat literasi anak Indonesia, terutama masyarakat yang berada di wilayah terluar Indonesia.

Pustakawan sebagai profesi yang dimandati Undang-Undang untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan secara profesional dan Perpustakaan Nasional yang merupakan *leading sector* dalam pembudayaan kegemaran membaca harus memasang pandangan mata ke arah wilayah terluar Indonesia. Persebaran pustakawan yang tidak merata harus disiasati dengan sebuah program terobosan agar pembudayaan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan di wilayah terluar tidak terganggu dan dapat berjalan dengan baik.

Saling Silang Pustakawan merupakan sebuah program yang memungkinkan pertukaran antar pustakawan atau tenaga perpustakaan antara wilayah yang memiliki pustakawan berlebih dengan yang tidak, atau antara jenis perpustakaan yang memiliki pustakawan berlebih dengan jenis perpustakaan yang kekurangan. Program ini disusun dengan pendekatan *Strength-Opportunity* setelah dilakukan analisis SWOT. Sebagai contoh, *inpassing* merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan jumlah pustakawan secara kuantitas tapi tidak secara kualitas. Tenaga Perpustakaan di wilayah terluar dapat mengikuti *inpassing* namun setelah itu dapat dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta magang di Perpustakaan Nasional atau Perguruan Tinggi, sementara itu untuk mengisi kekosongan dan mengembangkan perpustakaan dan budaya membaca, pustakawan dari Perpustakaan Nasional atau Perguruan Tinggi dapat dikirim atau diperbantukan ke daerah terluar tersebut. Dengan demikian, kelemahan yang ada saat ini, yaitu persebaran pustakawan yang tidak merata, dapat ditekan dengan kekuatan dan peluang yang ada di depan mata dapat dijalkan.

Perpustakaan Nasional sebagai intansi yang diberi

mandat oleh Undang-undang No. 43 Tahun 2007 untuk melakukan pembinaan perpustakaan secara nasional, selain memerlukan Rencana Strategis, juga memerlukan terobosan dalam bentuk sebuah program. Pustakawan Perpustakaan Nasional pun hendaknya mulai keluar dari memikirkan Perpustakaan Nasional menjadi memikirkan

Perpustakaan se-Nasional. Dengan dukungan dari pemegang kebijakan (Kepala Perpustakaan Nasional) sebagai kekuatan, maka sudah waktunya pustakawan Perpustakaan Nasional menjadi mata badai dari PUSTAKAWAN BERGERAK!

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). *Kajian pengembangan kebijakan asimetris dalam pembangunan di kawasan perbatasan Negara*. Jakarta: Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas.
- Bertens, K. (2004). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kbbi.go.id>
- Mullis, I.V.S, et.al. *PIRLS 2011 International Results in Reading*. Massachusetts: 2012
- Perpustakaan Nasional RI. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016: Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Perpustakaan Nasional RI. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016: Pusat Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Perpustakaan Nasional RI. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016: Pusat Pengembangan Pustakawan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sulistyo-Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Undang – Undang Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Diunduh dari <http://kelembagaan.pnri.go.id/Digital_Docs/homepage_folders/activities/highlight/ruu_perpustakaan/pdf/UU_43_2007_PERPUSTAKAAN.pdf> pada 31 Agustus 2017

Website:

[Http://Pustakawan.Perpusnas.go.id](http://Pustakawan.Perpusnas.go.id)

[Http://BPPN.go.id](http://BPPN.go.id)